



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KALIMANTAN SELATAN

#bangga
melayani
bangsa



KEMENKUM KALSEL NEWS

BULETIN

MINGGU KE-

1

JUNI 2025



AUDIENSI BERSAMA KAPOLDA
KALIMANTAN SELATAN



PERINGATAN HARI LAHIR
PANCASILA



EXPOSE KINERJA
SATU DEKADE DJKI

KANWIL KEMENKUM KALIMANTAN SELATAN

- DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
- DIVISI PELAYANAN HUKUM
- BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Terhubung lebih dekat:



kemenkumkalsel



@kemenkumkalsel



kalsel.kemenkum.go.id



Dukung Kebudayaan Daerah, Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Barito Kuala Serumpun Festival 2025



Marabahan, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) turut berpartisipasi dalam kegiatan Barito Kuala Serumpun Festival Tahun 2025 yang secara resmi dibuka pada Minggu, (01/06/2025), bertempat di Gedung Serbaguna Marabahan, Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan jajaran.

Barito Kuala Serumpun Festival merupakan agenda pariwisata unggulan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang mengangkat kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik wisata. Terdapat tiga event utama dalam festival ini, yakni Festival Kuliner, Purun Fashion Carnaval, dan Festival Tari Serumpun Melayu Pesisir. Kegiatan ini berlangsung hingga Senin, 2 Juni 2025.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, Sabirin. Dalam suasana yang meriah dan penuh antusias, masyarakat disuguhkan berbagai penampilan budaya dan kuliner tradisional khas daerah, termasuk Festival Kuliner Bakumpai yang menampilkan masakan tradisional Barito Kuala.

Selain itu, berbagai produk UMKM lokal turut dipamerkan dalam booth jajanan yang menambah semarak kegiatan. Kanwil Kemenkum Kalsel juga membuka layanan konsultasi dan pendaftaran terkait Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelaku usaha dan pelestarian kekayaan intelektual masyarakat Barito Kuala.

Melalui kehadiran dan layanan yang diberikan, Kanwil Kemenkum Kalsel menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan potensi daerah serta mempermudah akses layanan hukum dan kekayaan intelektual bagi masyarakat.



Dekatkan Layanan Hukum ke Masyarakat, Kemenkum Kalsel Hadirkan Layanan AHU dan KI di Barito Kuala Serumpun Festival 2025



Marabahan, Humas_Info – Dalam rangka mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menghadirkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) pada kegiatan Barito Kuala Serumpun Festival 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, pada Minggu hingga Senin, 1 - 2 Juni 2025.

Dalam kegiatan ini, masyarakat yang hadir mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi sekaligus melakukan pendaftaran layanan hukum, seperti pembuatan badan hukum, konsultasi perseroan perorangan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta hingga desain industri.

Partisipasi Kanwil Kemenkum Kalsel dalam festival ini menjadi bagian dari upaya jemput bola terhadap masyarakat yang memerlukan layanan hukum namun terkendala jarak dan akses.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa layanan hukum tidak hanya tersedia di kantor, tetapi juga menjangkau langsung ke tengah masyarakat,” ungkap Plt. Kepala Kantor Wilayah, Nuryanti Widyastuti.

Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, khususnya dari para pelaku UMKM yang ingin melindungi merek produk lokal mereka. Selain mendapatkan informasi, banyak di antara mereka yang langsung mengajukan pendaftaran merek dan berkonsultasi terkait legalitas usahanya.

Kegiatan layanan ini sejalan dengan semangat Barito Kuala Serumpun Festival 2025 yang turut menampilkan kekayaan budaya dan produk lokal. Dengan perlindungan hukum yang memadai, karya dan usaha masyarakat Barito Kuala diharapkan dapat berkembang lebih jauh dan bersaing secara legal di tingkat nasional hingga internasional.

Melalui kehadiran aktif dalam kegiatan daerah seperti ini, Kanwil Kemenkum Kalsel terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, serta mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di berbagai lapisan masyarakat.

Masyarakat Merasakan Hasil Program Presiden Prabowo



Jakarta, 28 Mei 2025 - Program Presiden Prabowo Subianto mulai terasa manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Memasuki masa enam bulan usia pemerintahan, Presiden sudah mengimplementasikan banyak program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan sosial, revitalisasi sekolah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan program swasembada pangan. Hasil positif dari pelaksanaan Program Presiden Prabowo bukan klaim belaka, namun disampaikan para penerima manfaat dalam forum Public Hearing bertajuk “Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil” di Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025. Forum ini menghadirkan anggota Kabinet Merah Putih yang bertanggung jawab atas program dan para penerima manfaat program dari berbagai latar belakang, seperti petani, buruh, siswa sekolah, penyandang disabilitas, hingga lansia.

Wildan, petani dari Kabupaten Kuningan menyampaikan, petani memang mengharapkan dan mendukung program Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. “Sangat puas sekali, pada saat panen kemarin sebagai anggota kelompok petani. Manfaatnya sangat dirasakan oleh petani,” katanya.

Poppy, penerima manfaat Program Keluarga Harapan menyampaikan, program ini sangat membantu meringankan beban keluarganya. “Keluarga saya sangat merasakan manfaat dari PKH.” Ada juga Yenri Neti yang merasakan manfaat program CKG. “Karena Program CKG, penyakit saya jadi terdeteksi semua. Prosesnya cepat dan sangat membantu,” ujar Yenri.

Hal senada juga disampaikan dua penerima manfaat Program KIP Kuliah, Annisa Febriana dan Indah Trifilia. Keduanya asal Banyumas. Annisa mengaku mendapatkan bantuan pendidikan PIP sejak SD hingga SMK. Ia merasa pemerintah memfasilitasi keinginannya untuk terus sekolah. “Saya berkomitmen untuk aktif kuliah, ternyata ada Program KIP Kuliah,” kata Annisa. “Untuk saya, beasiswa KIP dan PIP seperti menemukan emas, karena saya berlatar belakang keluarga kurang mampu. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan peluang untuk saya dan teman-teman sehingga bisa berkuliah,” tambah Indah.

Nana, wali murid, menceritakan kesannya terhadap Program MBG. Menurut dia, MBG mendorong anaknya menyukai makanan bergizi dan sayuran. “Anak saya jadi lebih semangat ke sekolah karena antusias dengan menu MBG. Anak saya jadi suka sayur,” ujar Nana.

Angel Nadea, akuntan, terharu bisa bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurutnya, ini pengalaman yang tak ternilai. “Setiap hari banyak ucapan terima kasih dari berbagai pihak untuk MBG. Setiap saya memberikan gaji, ada aura bahagia dari para pekerja di SPPG,” kata Angel.

Penerima Program KUR juga menyampaikan testimoniya. Irianti, pedagang keong sawah, mengaku mendapatkan KUR sebesar Rp150 juta. Bantuan itu ia memanfaatkan untuk merenovasi tempat usaha. “Tadinya tempat usaha saya tidak layak, sekarang menjadi layak. Untuk mengajukan sertifikat halal, saya harus punya dapur sendiri dan sekarang saya sudah punya dapur sendiri. Alhamdulillah usaha saya semakin meningkat,” kata Irianti.

Setelah mendengar testimoni masyarakat, anggota Kabinet Merah Putih yang bertanggung jawab terhadap program mendapat kesempatan menanggapi. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, Presiden Prabowo membuat Program CKG agar potensi penyakit bisa dideteksi sejak dini. Harapannya, potensi itu tidak menjadi penyakit berbahaya seperti jantung dan stroke. “CKG sudah mulai sejak 10 Februari. Sampai saat ini sudah 6,9 juta yang ikut CKG tanpa biaya alias gratis,” kata Dante.

Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, penyaluran KUR sudah mencapai Rp107 triliun atau 36% dari target Rp300 miliar pada 2025. Menurutnya, ke depan, pemerintah tidak hanya akan fokus pada kuantitas, tapi bagaimana meningkatkan kualitas pendistribusian KUR. “Kalau kita evaluasi, maka kita buat program pembinaan sesuai kebutuhan pelaku KUR. Ada yang butuh renovasi, akses pasar, dan sebagainya,” kata Maman.

Dari sektor pertanian, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, pemerintahan Prabowo menggenjot mekanisasi, sehingga proses tanam, panen, sampai pengolahan hasil pertanian bisa lebih cepat. Jadi, dalam setahun, petani bisa lebih sering panen. “Dengan mesin, proses menanam bisa selesai dalam satu jam. Kami berupaya memenuhi peralatan pertanian, ketersediaan dan distribusi pupuk, dan menyerap Harga Gabah Kering Rp6.500. Di pemerintahan Pak Prabowo kita sat set membela petani,” ujar Sudaryono.

Pejabat Kurang Tidur Karena Bekerja Keras

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, melalui Forum Public Hearing, PCO ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah bekerja keras melaksanakan janji kampanye. Kerja pemerintah tidak lagi cepat tapi ngebut. Baru enam bulan, tapi pemerintah mengerjakan banyak program untuk masyarakat. “Saya rasa Bang Jabo (Wamensos Agus Jabo) kelihatan kurang tidur, karena kerja terus. Mas Dar (Sudaryono) juga kurang tidur. Prof Dante (Wamenkes) kerjanya luar biasa. Kami sekadar memfasilitasi. Hari ini, penerima manfaat ketemu dengan para pembuat kebijakan,” kata Hasan.

Menurut Hasan, dari forum ini ada umpan balik. Kalau ada yang masih kurang bisa diperbaiki. “Kita bikin terang semua. Disampaikan secara jujur dan apa adanya. Karena kami juga terbuka dengan kritik,” ujar Hasan.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, mendukung penuh atas implementasi berbagai program Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial yang merata. “Sebagai perwakilan Kementerian Hukum di daerah, kami melihat bahwa kebijakan strategis ini tidak hanya menyasar kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan dan perlindungan hukum, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pelaku usaha mikro,” ujar Nuryanti. Ia menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam memastikan setiap program menyentuh masyarakat hingga lapisan terbawah, sehingga cita-cita pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan dapat segera terwujud.

KUR Bangun Kepercayaan Diri UMKM



Jakarta, 28 Mei 2025 - Abi, penyandang disabilitas, mengaku kehidupannya kini tak lagi gelap. Setelah mengikuti program pelatihan keterampilan memijat, ia berhasil memaksimalkan indra lain untuk memperoleh nafkah. Bukan hanya mandiri secara keuangan, kepercayaan dirinya juga kian kuat terbangun.

“Saya sangat berterima kasih telah merasakan manfaat dari pelatihan di bidang pijat,” kata Abi saat diberi kesempatan menyampaikan pengalaman dalam acara Public Hearing bertajuk Public Diplomacy: Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil, Rabu (28/5/2025).

Di kesempatan sama, Desi bersyukur mendapat pinjaman lunak dari Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia yang semula hanya reseller online sparepart dan aksesoris motor, kini sudah memiliki toko sendiri. “Dengan penambahan modal KUR, toko saya bisa online dan offline. Syarat KUR mudah, bunganya juga ringan. Jadi dengan ini sangat membantu, tidak khawatir macet pokoknya,” tegasnya.

Serupa, Jainab Iryanti memanfaatkan dana KUR untuk merenovasi tempat usaha. “Dulunya, tempat usaha saya tidak layak. Akhirnya sekarang menjadi layak dan juga bisa untuk memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat halal, yakni harus punya dapur sendiri,” jelasnya.

Ketiganya berkesempatan menyampaikan testimoni di kegiatan perdana yang mempertemukan langsung sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah Putih dengan seratusan penerima manfaat berbagai program pemerintah. Para pejabat negara langsung memberikan tanggapan dalam acara yang dikemas oleh Gerakan Milenial Pencinta Tanah Air (Gempita) bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO).

“Kali ini, kita menyelenggarakan diplomasi publik di mana para pejabat duduk dengan masyarakat. Kita ingin tunjukkan langsung ke hadapan masyarakat bahwa pemerintah sudah melaksakan janji,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi saat sambutan.

Acara ini bukan sekadar kegiatan yang pertama mempertemukan pejabat penanggung jawab program sekaligus dengan banyak penerima manfaat. Lebih dari itu, harus ada umpan balik untuk bahan evaluasi program. Masyarakat diharapkan menyampaikan informasi secara jujur apa adanya tentang apa yang mereka rasakan. Sebaliknya, para menteri juga harus menyampaikan dengan jelas apa yang dilakukan pemerintah saat ini dan yang akan datang.

“Hari ini kita bikin terang semua, bahwa pemerintah sudah bekerja keras. Hari ini panggungnya para Menteri sebagai eksekutor sekaligus operator. Panggung ini juga milik penerima manfaat, kalau ada saran, silakan sampaikan,” kata Hasan.

Dalam kesempatan ini, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah dengan segala upaya sudah menyiapkan karpet merah untuk pengusaha UMKM melalui Program KUR. Program KUR menawarkan bunga rendah, sebab ada subsidi pemerintah terhadap perbankan yang menjadi mitra program. Persoalannya, ada yang berhasil dan tidak dalam berusaha. “Saya kembalikan, saya sampaikan bahwa yang tidak berhasil semuanya tergantung kembali kepada nasabah. Artinya, kalau misalnya ada yang tidak berhasil, kita evaluasi, nah di situ kita masuk ke program pembinaan,” jelas Maman.

Kementerian UMKM bersama bank penyalur KUR memiliki program pembinaan, tergantung dari kebutuhan masing-masing penerima KUR. Antara lain, pelatihan manajemen keuangan, akses pasar, atau biaya renovasi dan lain sebagainya. “Kita ingin semakin banyak testimoni dari masyarakat. Jadi, tidak hanya sekadar menitikberatkan keberhasilan itu hanya diukur dari jumlahnya. Yang menjadi ukuran adalah pada saat pemerintah memberikan bantuan, masyarakat usahanya bisa berkembang,” ujar Maman.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyambut baik kisah sukses para pelaku UMKM yang mendapatkan pinjaman KUR dan pelatihan keterampilan, karena hal ini tidak hanya membuktikan efektivitas program pemerintah dalam memajukan sektor mikro, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri masyarakat dalam berwirausaha. “Sebagai perwakilan Kementerian Hukum RI di daerah, kami melihat bahwa kemudahan akses modal melalui KUR yang disertai pelatihan serta pendampingan, turut membuka peluang bagi penyandang disabilitas maupun pelaku usaha kecil untuk tumbuh kemandirian ekonominya. Kami dari Kemenkum Wilayah Kalsel berkomitmen memastikan setiap pelaku UMKM memperoleh perlindungan hukum, kemudahan perizinan, dan pendampingan sertifikasi—termasuk sertifikat halal—sehingga keberlanjutan usaha mereka terjamin. Keberhasilan Abi, Desi, dan Jainab Iryanti tersebut menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara lembaga kementerian, perbankan, dan masyarakat akan semakin memperkuat fondasi UMKM sebagai motor perekonomian daerah,” ucapnya.

Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Upacara Virtual Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, pada Senin (2/6). Kegiatan ini menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar bangsa yang telah mempersatukan Indonesia dalam keberagaman.

Upacara diikuti secara khidmat oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti; Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalsel, Karyadi; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah; serta seluruh pegawai dari Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Para peserta mengikuti kegiatan di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah dengan penuh semangat nasionalisme.

Peringatan tahun ini mengusung tema “Garuda Pancasila Sebagai Simbol Jati Diri Bangsa”, yang menegaskan kembali peran penting Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Garuda sebagai lambang negara menjadi representasi kekuatan dan keberanian, sedangkan nilai-nilai Pancasila menjadi dasar pijakan dalam menghadapi tantangan bangsa di era modern saat ini.

Dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang dibacakan Inspektur Upacara, Mugianto, selaku Wakil dari Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia.

“Pancasila bukan hanya dokumen historis atau teks normatif dalam pembukaan UUD 1945, melainkan jiwa bangsa dan bintang penuntun dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Melalui Asta Cita, seluruh elemen bangsa dipanggil untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan,” ucapnya.

Seruan tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk membumikan Pancasila melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kanwil Kemenkum Kalsel Harmonisasikan Ranperbup Tata Kelola RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Harmonisasi kali ini membahas Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Barito Kuala tentang Pedoman Internal Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Aziz Marabahan.

Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana, didampingi oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Eryck Yulianto, serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, hadir Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, dr. Aan Widhi Anningrum, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Metty Monita, beserta jajaran.

Mengawali rapat, Anton Edward Wardhana menegaskan bahwa harmonisasi ini merupakan amanah dari Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Harmonisasi dilakukan untuk memastikan agar setiap rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercipta pembulatan dan pemantapan konsep yang ada pada rancangan,” ujar Anton.

Senada dengan itu, Eryck Yulianto menambahkan bahwa harmonisasi merupakan bentuk komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung pemerintah daerah untuk menghadirkan regulasi yang berkualitas, terintegrasi, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, dr. Aan Widhi Anningrum, turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan atas pendampingan dan kerja sama yang sangat membantu dalam penyusunan produk hukum daerah, khususnya dalam upaya menghadirkan tata kelola rumah sakit yang profesional dan berprinsip pada kepentingan masyarakat,” ucapnya.

Dalam pembahasan substansi Ranperbup, disampaikan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak asasi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penyelenggaraan rumah sakit sebagai penyedia layanan publik harus dikelola secara profesional dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat (unsur filosofis).

Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang bermutu, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, diperlukan pedoman tata kelola internal rumah sakit yang menjadi acuan bagi seluruh unsur pelaksana rumah sakit (unsur sosiologis).

Rapat harmonisasi berjalan lancar, dengan perbaikan dan penyempurnaan substansi maupun teknik penulisan dilakukan secara komprehensif. Diharapkan Ranperbup ini dapat segera disahkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

Dibuka Wamenkum, Jajaran Kemenkum Kalsel Ikuti Pembukaan Orientasi CPNS TA 2024 Secara Daring



Banjarmasin, Humas_Info – Senin (2/6) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pembukaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Hukum secara virtual.

Turut hadir mengikuti kegiatan ini, Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan perwakilan dari masing-masing tim kerja, serta seluruh CPNS yang bertugas di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta menyampaikan bahwa proses pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024 diawali dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 293 Tahun 2024 yang menetapkan formasi sebanyak 9.070 orang untuk Kementerian Hukum dan HAM. Dari jumlah tersebut, 8.951 pelamar dinyatakan lulus untuk mengisi formasi yang terbagi atas 7.863 untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas), 863 untuk Kementerian Hukum, serta 224 untuk Kementerian HAM.

Sekjen juga menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi CPNS telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses ini diawasi langsung oleh lembaga publik seperti Ombudsman RI serta dapat dipantau masyarakat melalui platform media streaming.

Acara dilanjutkan dengan pemutaran video kilas balik rekrutmen CPNS TA 2024 dan penyerahan simbolis Surat Keputusan (SK) CPNS oleh Wakil Menteri Hukum, Edwars O.S. Hiariej. Selanjutnya, Wamenkum secara simbolis membuka Orientasi CPNS TA 2024 dan memberikan sambutan.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hukum menyampaikan bahwa CPNS yang terpilih adalah individu yang memiliki integritas dan kualitas intelektual tinggi. Ia mengajak para CPNS untuk bangga menjadi bagian dari Kementerian Hukum.

“Bekerjalah dengan hati. Jadilah ASN yang berintegritas dan memiliki kualitas intelektual. Keberhasilan Kementerian ini adalah hasil sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran,” tegasnya.

Melalui kegiatan orientasi ini, diharapkan para CPNS dapat memahami tugas, fungsi, dan nilai-nilai dasar ASN sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas di Kementerian Hukum.



Transformasi Digital dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah: Kemenkum Kalsel Sosialisasikan Aplikasi E-Harmonisasi



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Harmonisasi secara daring, Senin (2/6/25). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Kota/Kabupaten serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Kalimantan Selatan.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Divisi PPPH, Anton Edward Wardhana dan diawali dengan sambutan dari Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, yang saat ini menjabat sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama Kementerian Hukum RI.

Dalam sambutannya, Nuryanti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kegiatan secara daring. Ia menuturkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan aplikasi E-Harmonisasi dalam mendukung proses pembentukan produk hukum daerah yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

“Melalui kegiatan ini, kami menghadirkan narasumber yang sangat kompeten agar pemanfaatan E-Harmonisasi di Kalimantan Selatan benar-benar dapat dipahami dan dioptimalkan oleh pemerintah daerah maupun sekretariat dewan,” ujar Nuryanti.

Ia juga menghimbau kepada seluruh peserta agar memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin untuk berdiskusi, bertanya, dan menggali informasi langsung dari narasumber utama.

“Gunakan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan Direktur sebagai narasumber, agar proses harmonisasi ke depan dapat berjalan pada aplikasi ini secara akuntabel dan profesional,” tegas Nuryanti.

Hadir sebagai narasumber utama, Direktur Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Alexander Palti menyampaikan bahwa aplikasi E-Harmonisasi diharapkan mampu menciptakan efisiensi dalam proses pengharmonisasian serta membangun integrasi dan kolaborasi yang lebih kuat antar instansi, baik pusat maupun daerah.

“Aplikasi ini merupakan bagian dari transformasi digital yang diamanatkan oleh Menteri Hukum, di mana seluruh lini layanan harus mulai bergerak ke arah digitalisasi,” jelas Alexander.

Dalam kegiatan ini, Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga menyampaikan pembahasan teknis secara mendalam kepada para peserta. Sesi diskusi dan tanya jawab turut digelar untuk membahas proses penggunaan aplikasi, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang diharapkan dari penerapan sistem E-Harmonisasi.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam mempercepat transformasi digital layanan peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya dalam memperkuat sinergi dan kualitas pembentukan produk hukum daerah di Kalimantan Selatan.



Kemenkum Ikuti Webinar DJKI : Pentingnya Lisensi Musik dan Lagu untuk Perlindungan Hak Cipta



Banjarmasin, KI_Info – Senin (02/06), Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan mengikuti webinar nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum melalui platform Zoom Meeting. Kegiatan ini mengangkat tema “Pentingnya Lisensi Penggunaan Musik dan Lagu”, dengan menghadirkan narasumber Makki Omar Parikesit, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan KI, para pelaksana pada Bidang Pelayanan KI, serta petugas Helpdesk Pelayanan KI dari ruang kerja masing-masing.

Dalam paparannya, Makki Omar Parikesit menegaskan bahwa lisensi musik merupakan instrumen hukum penting yang memberi kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk mengizinkan penggunaan karya cipta miliknya, baik secara individu maupun kolektif. Namun, tantangan besar masih membayangi implementasi lisensi di Indonesia, terutama rendahnya tingkat kepatuhan pengguna musik terhadap aturan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, disampaikan pula bahwa ketentuan mengenai hak cipta telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 113. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelanggaran penggunaan musik atau lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikenai sanksi pidana maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp. 1 miliar.

DJKI bersama LMKN juga didorong untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam manajemen pengelolaan royalti musik, guna memastikan distribusi royalti dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran kepada para pencipta.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam webinar ini menunjukkan komitmen dalam mendukung perlindungan kekayaan intelektual dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya lisensi musik di era digital saat ini.



Jadi Tunas Pengayoman, CPNS Kemenkum Kalsel Dapat Motivasi dari Plt. Kakanwil



Banjarmasin, Humas_Info - Senin (02/06), Sebanyak 16 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum resmi bergabung sebagai bagian dari keluarga besar Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Pada hari pertama setelah dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej, CPNS di lingkungan Kemenkum Kalsel mendapatkan pengarahan yang diberikan langsung oleh Plt. Kepala Kantor Wilayah, bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Dalam kegiatan tersebut, Plt. Kakanwil, Nuryanti Widyastuti didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), Dewi Woro Lestari, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Riswandi, serta Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Eko Herdianto.

Mengawali arahnya, Plt. Kakanwil berkenalan dengan para CPNS dan memperkenalkan jajaran struktural Kanwil sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan para CPNS melewati proses panjang hingga akhirnya resmi menjadi bagian dari Kementerian Hukum.

"Selamat datang dan selamat bergabung. Kalian adalah tunas-tunas baru pengayoman yang diharapkan menjadi generasi penerus yang siap menjaga marwah institusi ini," ujarnya.

Tak hanya menyambut, Plt. Kakanwil juga memberikan motivasi dan penegasan kepada para CPNS untuk senantiasa siap bekerja di manapun mereka ditempatkan, serta terus menunjukkan semangat dan dedikasi tinggi.

"Fokus pada tugas dan wewenang masing-masing. Jadikan momen ini sebagai awal untuk berkinerja, belajar, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara," pesannya.

Dengan pengarahan ini, diharapkan para CPNS memiliki bekal semangat dalam menjalani masa awal pengabdian sebagai bagian dari insan pengayoman.





Wamenkum : Selamat Datang, Calon Birokrat Pemerintahan!



Jakarta – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej, menyambut Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024. Hal ini dilakukan Wamenkum saat memberikan sambutan sekaligus memberi kuliah umum kepada seluruh CPNS yang hadir dalam Orientasi CPNS Tahun Anggaran 2024. “Selamat datang saudara-saudara sebagai calon birokrat pemerintahan, yang memberi suasana baru bagi Kementerian Hukum,” sambut Wamenkum di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Senin (02/06/2025).

Wamenkum menyampaikan kunci menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024. Menurut Wamenkum, untuk menjadi ASN yang baik, dibutuhkan integritas dan kapasitas intelektual yang memadai. Wamenkum menerangkan, Integritas adalah kualitas atau sifat seseorang yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan komitmen terhadap nilai etika, sedangkan kapasitas intelektual adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, memahami, belajar menganalisis, memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara logis dan efektif. “Ketika kita sudah memiliki integritas dan kapasitas intelektual yang memadai, maka keinginan untuk menerapkan nilai-nilai ASN, yaitu #BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) akan tercapai,” tutur Wamenkum.

Lebih lanjut Wamenkum mengatakan, bahwa setelah memasuki dunia pemerintahan, para CPNS diharuskan memahami birokrasi. “Saudara harus paham apa itu birokrasi, yaitu struktur organisasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai atau aparat yang bekerja menurut aturan, prosedural dan hirarki,” terang Wamenkum yang sering disapa Edy.

Di akhir sambutannya, Wamenkum mengingatkan kepada seluruh CPNS untuk bekerja dengan hati, dan diharapkan dapat memberi suasana baru bagi Kemenkum. “Keberhasilan Kemenkum, bukan keberhasilan Menteri, Wakil Menteri, Sekjen (Sekretaris Jenderal), Irjen (Inspektur Jenderal), Dirjen (Direktur Jenderal), dan Kepala Badan, tetapi ini keberhasilan bersama,” tandas Wamenkum.

“Karena kita bekerja, bersinergi, harmonis, dan kolaboratif untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara, yakni, membangun negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” tutup Wamenkum.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan orientasi ini akan berbentuk pemaparan materi mengenai Kementerian Hukum. “Kegiatan orientasi ini akan diisi dengan pengenalan unit-unit kerja yang ada di bawah Kementerian Hukum sehingga para CPNS disini bisa tahu dimana akan bertugas dan apa tanggung jawabnya nanti,” ujar Sekjen. Kami berharap, lanjut Sekjen, kedepannya para CPNS 2024 mampu bekerja dengan sangat baik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), pada saat belum adanya transformasi kementerian, membuka seleksi untuk 9.070 formasi, dan mendapat antusiasme dmasyarakat sebanyak 491.651 pelamar. Dari jumlah pelamar tersebut, sebanyak 8.951 pelamar dinyatakan lulus untuk mengisi formasi Kemenkumham, dengan rincian formasi 7.863 untuk Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 863 untuk Kementerian Hukum, dan 224 untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Sejumlah 863 formasi Kementerian Hukum melanjutkan proses Penetapan NIP dengan sebaran sejumlah 335 orang untuk formasi Pusat, dan 528 orang untuk formasi Wilayah yang tersebar pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia. Seluruh pelaksanaan rangkaian Rekrutmen CPNS TA 2024 ini dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel. Transparansi seleksi CPNS ini juga turut diawasi oleh lembaga pelayanan publik yakni Ombudsman RI dan juga masyarakat dapat mengawasi secara langsung melalui platform media streaming. Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, yang dinanti-nanti oleh para peserta yang telah berhasil lulus seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 ini, dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 2 hingga 4 Juni 2025 secara hybrid. Bagi para CPNS formasi pusat, orientasi dilakukan secara luring bertempat di Graha Pengayoman Kemenkum, dan bagi formasi wilayah secara daring.

Secara terpisah Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menyambut dengan penuh semangat dan kebanggaan hadirnya para Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya yang akan bertugas di wilayah Kalimantan Selatan. “Apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri Hukum menjadi pengingat penting bagi kita semua, bahwa integritas dan kapasitas intelektual adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Para CPNS adalah energi baru yang diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi secara profesional dan berakhlak,” ucapnya.



Meriah! Penutupan Barito Kuala Serumpun Festival 2025 Disemarakkan dengan Tarian dan Apresiasi Kekayaan Intelektual



Barito Kuala, Humas_Info — Suasana semarak mewarnai malam penutupan Barito Kuala Serumpun Festival (BKSF) Tahun 2025 yang digelar pada Senin malam, (02/06/2025), bertempat di Gedung Serbaguna Marabahan, Barito Kuala. Acara dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat umum.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan jajaran turut hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan penutupan festival sekaligus menyerahkan apresiasi surat pencatatan ciptaan kekayaan intelektual kepada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Festival ini merupakan agenda pariwisata tahunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal sebagai daya tarik wisata di Bumi Ije Jela. Tiga agenda utama yang menjadi sorotan dalam festival ini adalah Festival Kuliner, Purun Fashion Carnaval, serta Festival Tari Serumpun Melayu Pesisir.

Dalam kesempatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel juga membuka layanan langsung kepada masyarakat berupa konsultasi Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI), sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya dan penguatan legalitas karya masyarakat.

Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Bupati Barito Kuala, Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H., yang dalam sambutannya berpesan agar masyarakat Barito Kuala terus berkarya dan berinovasi untuk kemajuan daerah.

Malam penutupan semakin semarak dengan penampilan tarian dari peserta Festival Tari Serumpun VII Melayu Pesisir 2025 yang memukau para penonton dan dinilai para juri yang ahli dibidang seni tari nusantara dan lokal. Tak ketinggalan, pameran booth jajanan UMKM Barito Kuala turut meramaikan acara, menambah warna dan semangat dalam perayaan budaya lokal setempat.





Budaya Barito Kuala Kini Semakin Diakui! Tiga Ciptaan Lokal Diresmikan sebagai Kekayaan Intelektual di BKSF 2025



Barito Kuala - Humas_Info — Komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melestarikan budaya lokal mendapat dukungan nyata dari Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan. Dalam momen penutupan Barito Kuala Serumpun Festival (BKSF) Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Marabahan, Kanwil Kemenkum Kalsel menyerahkan tiga Surat Pencatatan Ciptaan Kekayaan Intelektual (KI) kepada Pemerintah Daerah, pada Senin malam (02/06/2025).

Adapun tiga surat pencatatan ciptaan tersebut meliputi:

- Surat Pencatatan Ciptaan Festival Tari Serumpun Melayu Pesisir
- Surat Pencatatan Ciptaan Seni Pertunjukan Barito Kuala Serumpun Festival
- Surat Pencatatan Ciptaan Purun Fashion Carnaval

Penyerahan ini merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual milik daerah, khususnya di sektor budaya dan pariwisata. Ketiga karya tersebut merupakan bagian dari rangkaian utama kegiatan Barito Kuala Serumpun Festival, sebuah event pariwisata tahunan yang menampilkan ragam budaya lokal sebagai daya tarik wisata di Bumi Ije Jela. Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Meidy Firmansyah dan jajaran, dan secara simbolis menyerahkan sertifikat kepada Bupati Barito Kuala.

Dalam keterangannya, Plt. Kakanwil menyampaikan bahwa perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari pengembangan budaya daerah.

“Ciptaan-ciaptan budaya yang telah ditampilkan dan diakui masyarakat harus dilindungi secara hukum. Penyerahan sertifikat ini adalah wujud hadirnya negara dalam menjaga orisinalitas dan hak cipta masyarakat daerah,” ujar Nuryanti.

Ia juga menambahkan bahwa pencatatan kekayaan intelektual tidak hanya menjadi bentuk perlindungan hukum, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Bupati Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan dan berharap pencatatan kekayaan intelektual ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus berkarya dan menjaga warisan budaya.

Selain penyerahan Surat Pencatatan Ciptaan, Kanwil Kemenkum Kalsel juga membuka layanan konsultasi Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada masyarakat yang hadir di lokasi kegiatan.

Langkah ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memajukan budaya sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap aset intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Barito Kuala.



Masyarakat Melek Hukum: Layanan AHU dan KI Kemenkum Kalsel Diminati Pengunjung Barito Kuala Serumpun Festival 2025



Barito Kuala, Humas_Info — Antusiasme masyarakat terhadap layanan hukum semakin meningkat. Hal ini terlihat dari ramainya kunjungan masyarakat ke booth Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan pada Hari Kedua Barito Kuala Serumpun Festival Tahun 2025 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Senin siang hingga malam (02/06/2025).

Kanwil Kemenkum Kalsel menghadirkan layanan konsultasi dan informasi seputar Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai bagian dari komitmen untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Layanan ini pun mendapat sambutan luar biasa dari para pengunjung festival yang didominasi oleh pelaku seni, pengrajin lokal, pelaku UMKM, dan generasi muda kreatif.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan bahwa kehadiran layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual.

“Masyarakat kita sangat kreatif, dan sayangnya masih banyak yang belum menyadari pentingnya mendaftarkan karya atau usahanya secara hukum. Melalui layanan langsung seperti ini, kami ingin mempercepat literasi hukum dan mendorong mereka untuk mulai mencatatkan ciptaan dan legalitas usahanya,” ujar Nuryanti.

Pengunjung dapat berkonsultasi langsung mengenai layanan AHU seperti pendirian badan usaha, legalisasi yayasan atau perkumpulan, hingga pemanfaatan aplikasi perseroan perorangan serta layanan KI seperti pendaftaran merek, hak cipta, maupun desain industri. Petugas layanan dari Kanwil Kemenkum Kalsel juga menyediakan brosur informasi serta melakukan simulasi langsung cara pendaftaran daring.

Kegiatan ini menjadi bagian integral dari semangat Barito Kuala Serumpun Festival 2025 dalam mendorong potensi lokal tidak hanya dari sisi budaya dan pariwisata, tetapi juga dari aspek hukum dan ekonomi kreatif.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang sadar hukum dan melindungi hasil karyanya secara legal, diharapkan akan tercipta iklim usaha dan kreativitas yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala dan Kalimantan Selatan pada umumnya.



Dari AHU hingga KI, CPNS Kemenkum Kalsel Dapat Pembekalan Langsung dari Kadiv Yankum



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Meidy Firmansyah, memberikan materi pembekalan kepada para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam kegiatan orientasi yang digelar di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Selasa (3/6).

Dalam arahannya, Meidy menyampaikan sejumlah pesan penting sebagai bekal awal bagi 16 CPNS yang baru memulai perjalanan sebagai aparatur sipil negara di Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan.

“Selamat bergabung di keluarga besar Kementerian Hukum. Kalian adalah generasi penerus yang akan membawa semangat baru di Kementerian ini,” sebut Meidy Firmansyah.

Pada kesempatan tersebut, Meidy juga memberikan pengenalan terkait tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum. Ia menjelaskan bahwa Divisi ini membawahi dua bidang utama, yaitu Bidang Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Bidang Kekayaan Intelektual (KI).

“Bidang AHU berperan dalam pengesahan badan hukum, kewarganegaraan, fidusia, hingga legalisasi dokumen publik. Sementara Bidang KI memberikan perlindungan hukum melalui pelayanan pendaftaran merek, hak cipta, paten, dan jenis kekayaan intelektual lainnya,” jelas Meidy.

Ia berharap para CPNS mulai memahami fungsi pelayanan publik di sektor hukum sejak awal, sebagai bagian dari penguatan kapasitas mereka di masa mendatang. Lebih lanjut, Meidy menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja baru, mengingat sebagian besar CPNS masih tergolong fresh graduate.

“Adaptasi sangat penting terutama bagi seluruh pegawai, pelajari ritme kerja, pahami budaya organisasi, dan jalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja maupun atasan,” pesannya.

Kegiatan pembekalan ini menjadi bagian dari rangkaian orientasi CPNS di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, yang bertujuan memberikan pemahaman awal mengenai tugas, fungsi, dan etika sebagai ASN.



Kemenkum Kalsel dan Pemkab HST Harmonisasi Dua Rancangan Produk Hukum Daerah



Banjarmasin, Humas_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), membahas dua rancangan produk hukum daerah, yakni Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup).

Dua rancangan yang dibahas dalam rapat ini yaitu Ranperda Kabupaten HST tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 dan Ranperbup HST tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rapat dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana dan dipandu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Bahjahtul Mardiah serta diikuti oleh para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan. Dari pihak Pemkab HST, hadir Kepala Bappelitbangda Muhiddin, Wakil Ketua Bapemperda DPRD HST Nasruddin, Kepala Bagian Hukum Setda HST Taufik Rahman, serta jajaran dari Sekretariat DPRD HST.

Bahjahtul Mardiah menegaskan pentingnya kegiatan harmonisasi dalam proses pembentukan peraturan daerah. "Rapat harmonisasi ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kualitas regulasi yang dihasilkan," ujarnya.

Kepala Bappelitbangda Kabupaten HST, Muhiddin, turut mengapresiasi proses harmonisasi yang berlangsung. "Kami merasa sangat terbantu dengan adanya harmonisasi ini. Ini adalah tahapan penting dalam memastikan peraturan yang kami susun benar-benar berkualitas, aplikatif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," ungkapnya.

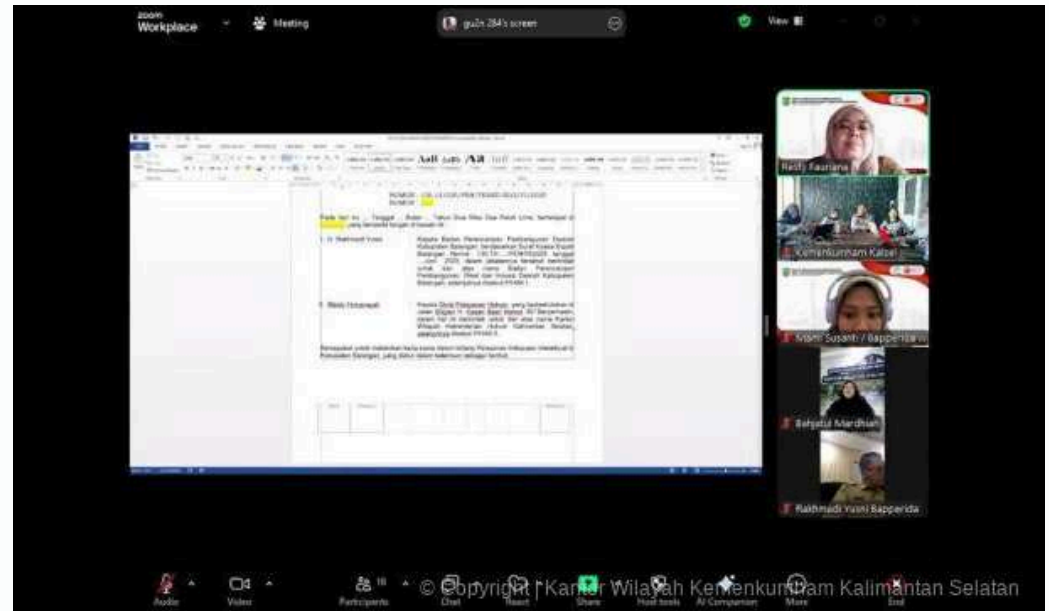
Wakil Ketua Bapemperda DPRD HST, Nasruddin, juga menyampaikan pandangan serupa. "Diskusi berjalan dengan baik dan lancar. Kami berterima kasih atas pendampingan dari Kemenkum Kalsel dalam menyempurnakan dua rancangan peraturan ini," katanya.

Adapun Ranperda RPJMD 2025–2029 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ranperda ini menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berjangka menengah.

Sementara itu, Ranperbup tentang Perubahan Keempat atas Perbup Nomor 58 Tahun 2017 disusun untuk menyesuaikan besaran tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan dan anggota DPRD HST sesuai perkembangan dan kemampuan keuangan daerah. Juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Perda Kabupaten HST Nomor 8 Tahun 2017. Rapat berlangsung dinamis dengan diskusi mendalam terkait substansi, konteks, dan redaksional. Proses harmonisasi berjalan lancar dan menunjukkan sinergi yang kuat antara Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Kabupaten HST dalam mendukung terciptanya produk hukum daerah yang berkualitas.



Perkuat Pilar Hukum dan Inovasi, Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemkab Balangan Finalisasi Kerja Sama Strategis



Banjarmasin, KI_Info - Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi di bidang pelayanan hukum dan kekayaan intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat finalisasi Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Selasa (3/6), di Ruang Rapat P3H.

Pertemuan ini menjadi langkah strategis menuju penguatan layanan kekayaan intelektual (KI) yang inklusif dan berkelanjutan di daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut Tim Pokja Audiensi, MOU, dan PKS Layanan KI dari Kanwil Kemenkum Kalsel yang terdiri dari Perwakilan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Helpdesk KI. Sementara dari pihak Pemkab Balangan turut serta Bagian Tapem, Bagian Hukum, serta Bapperida Balangan.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WITA ini diawali dengan pemaparan urgensi kerja sama sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan hukum dan perlindungan KI di Kabupaten Balangan. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pengkajian substansi MoU serta penyelarasan draf PKS yang mencakup pembagian peran, tanggung jawab, dan rencana program teknis ke depan.

Pihak Bapperida Balangan secara aktif memberikan masukan yang konstruktif terhadap isi dokumen kerja sama, memastikan setiap poin dalam MoU dan PKS selaras dengan visi pembangunan daerah dan regulasi yang berlaku.

“Finalisasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan layanan KI yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap potensi lokal. Kami ingin menjadikan Kabupaten Balangan sebagai salah satu model kolaborasi daerah dalam penguatan kekayaan intelektual,” ungkap salah satu perwakilan Kanwil Kemenkum Kalsel dalam sesi diskusi.

Hasil rapat menyepakati beberapa poin penting yang akan dituangkan dalam dokumen final MoU dan PKS. Rencana tindak lanjut juga disusun, termasuk agenda penandatanganan resmi dan pelaksanaan program kerja bersama yang diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha, UMKM, serta masyarakat kreatif di Balangan.

Kerja sama ini tidak hanya menjadi simbol komitmen kedua belah pihak, namun juga tonggak penting dalam membumikan peran hukum dan inovasi sebagai fondasi pembangunan daerah.



Pembekalan Awal oleh Kadiv P3H, CPNS Dalam Tugas dan Fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum



Banjarmasin, Humas_Info - Sebanyak 16 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru bergabung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mendapatkan pembekalan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Anton Edward Wardhana, pada Selasa (3/6). Pembekalan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan orientasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi unit kerja yang ada di lingkungan Kanwil.

Dalam suasana yang santai namun tetap serius, Anton Edward Wardhana menyampaikan materi pengenalan mengenai peran dan fungsi Divisi P3H. Ia menjelaskan bahwa divisi ini memiliki tugas utama membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, serta analisis kebijakan hukum di daerah. Tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan terkait di tingkat pusat.

Anton kemudian menguraikan tiga fungsi utama Divisi P3H. Fungsi pertama adalah terkait Peraturan Perundang-undangan, yaitu melakukan fasilitasi, harmonisasi, dan pembentukan peraturan daerah agar sesuai dengan norma dan prinsip pembentukan peraturan yang baik. Fungsi kedua adalah Pembinaan Hukum, di mana divisi ini menjalankan berbagai program penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta pemberdayaan masyarakat hukum yang sadar dan taat aturan. Sementara itu, fungsi ketiga berkaitan dengan Strategi Kebijakan, yang berfokus pada penyusunan kajian dan analisis hukum sebagai dasar perumusan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.

Anton menyampaikan pesan penting kepada para CPNS tentang nilai-nilai kerja di lingkungan Kementerian Hukum, khususnya pentingnya kerja sama tim atau team work. Ia menekankan bahwa keberhasilan organisasi bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kemampuan untuk bekerja sama, berkoordinasi, dan membangun sinergi antar sesama pegawai.

“Teamwork itu bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi bagaimana kita saling melengkapi, memperkuat, dan bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Manfaatnya bukan hanya terasa dalam hal efisiensi kerja, tetapi juga dalam membangun suasana kerja yang positif dan produktif,” ujarnya menutup pembekalan.



Hari Kedua, CPNS Kemenkum Kalsel Awali Aktivitas dengan Pembinaan Jasmani



Bamjarmasin, Humas_Info – Selasa (03/06/2025), kegiatan hari kedua bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan diawali dengan pembinaan jasmani di halaman depan kantor wilayah hingga jembatan Alalak.

Sebanyak 16 CPNS tampak antusias mengikuti rangkaian gerakan pemanasan dan olahraga pagi yang dipandu oleh tim panitia pelaksana.

Kegiatan pembinaan jasmani ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, meningkatkan kebugaran fisik, serta membentuk kekompakan antar peserta sejak masa orientasi. Melalui aktivitas ini, para CPNS diharapkan dapat menjaga stamina dan semangat dalam menjalani seluruh rangkaian pembentukan karakter sebagai Insan Pengayoman.

Selain sebagai bentuk pelatihan fisik, sesi ini juga menjadi momen penting dalam menumbuhkan semangat kebersamaan dan kesiapan mental para CPNS dalam menghadapi berbagai tantangan tugas sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum.

Rangkaian kegiatan akan terus berlanjut dengan berbagai materi penguatan wawasan, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai Kemenkum yang akan menjadi bekal penting dalam pengabdian ke depan.





Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Gelar Pelatihan Paralegal Serentak II untuk Kadarkum



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menggelar Pelatihan Paralegal Serentak (Parlentak) II yang dikhususkan bagi Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari pelatihan serupa yang telah sukses diselenggarakan pada awal tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat pemahaman hukum serta memperluas akses keadilan di tingkat desa dan kelurahan.

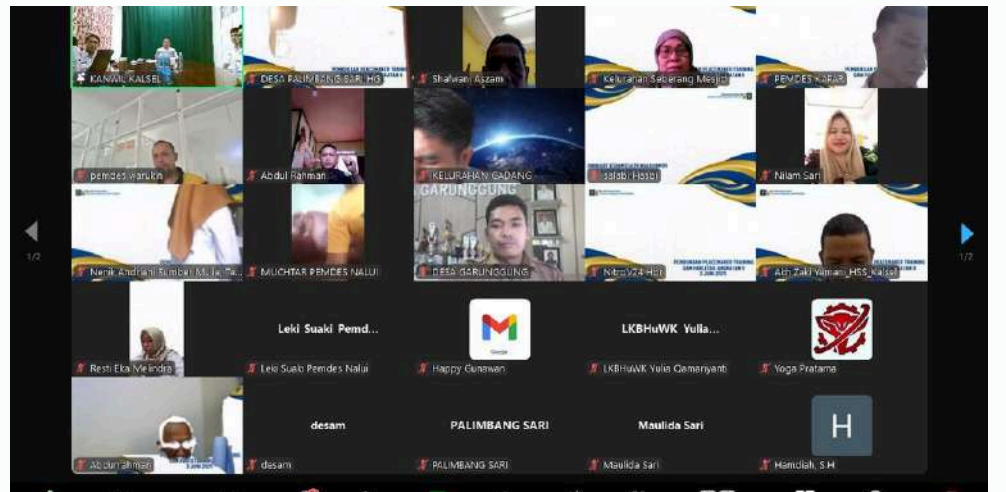
Pelatihan dilaksanakan pada Senin, (3/6) secara daring dari Ruang Rapat Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan, serta diikuti oleh 64 peserta dari enam daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong.

Kegiatan diawali dengan pelaksanaan pre-test oleh tim LKBHuWK Kalsel yang dipimpin oleh Dr. Yulia Qamariyanti bersama para Penyuluh Hukum dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Pada sesi ini, peserta juga mendapatkan penjelasan teknis mengenai metode pembelajaran yang akan diterapkan selama pelatihan berlangsung.

Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan total durasi 18 jam pelajaran. Usai mengikuti pelatihan di kelas, peserta akan melanjutkan proses aktualisasi selama tiga bulan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa atau kelurahan masing-masing.

Pada hari pertama, peserta menerima tiga materi utama dari narasumber berpengalaman. Materi pertama mengenai Pengantar Hak Asasi Manusia disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Karyadi. Materi kedua tentang Keparalegalan dibawakan oleh Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Togi Leonardo Situmorang. Sementara materi ketiga mengenai Teknik Penyusunan Dokumen Laporan, Pengaduan, dan Kronologis disampaikan oleh Dr. Nurhikmah dari LKBHuWK.

Dengan pelatihan ini, diharapkan para anggota Kadarkum dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan hukum dasar kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.





CPNS Kemenkum Kalsel Dalam Materi AHU dan KI di Hari Kedua Orientasi



Banjarmasin, Humas_Info – Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Hukum terus berlanjut. Memasuki hari kedua, Selasa (03/06), peserta orientasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima pembekalan materi dari dua bidang teknis dibawah Divisi Pelayan Hukum, yakni Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI).

Materi pertama disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Dewi Woro Lestari. Ia memaparkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum serta ragam layanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Sebagai garda terdepan pelayanan hukum, kita harus mampu memberikan layanan yang akurat, cepat, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Dewi, sembari menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

Selanjutnya, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang diwakili Analis KI Muda, Aji Rifani, memberikan pembekalan terkait konsep dasar kekayaan intelektual, jenis-jenis perlindungan KI, serta peran aktif Kantor Wilayah dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hasil karya dan inovasi.

“KI bukan hanya soal hak cipta atau merek, tapi juga bagian dari perlindungan atas potensi ekonomi masyarakat yang perlu diberi perhatian serius,” jelas Aji.

Sebagai tambahan, peserta juga diperkenalkan dengan penggunaan Aplikasi Sumaker dan Srikandi yang bertujuan untuk membekali CPNS dengan pemahaman awal mengenai tata kelola persuratan dan kearsipan digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.

Dengan selesainya pembekalan hari kedua ini, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai layanan teknis Kementerian Hukum serta siap mengemban tugas sebagai ASN yang adaptif dan berintegritas.





Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Audiensi Bersama Kapolda Kalimantan Selatan, Bahas Sinergi dan Pemanfaatan Aset



Banjarbaru, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) bertempat di Mapolda Kalsel, Selasa (3/6/26). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan serta membahas beberapa isu penting, termasuk pemanfaatan aset negara bersama dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, beserta jajaran pejabat Kanwil, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana serta Kepala Bagian TU dan Umum Rustam Sakka. Dari jajaran Polda Kalsel, hadir langsung Kapolda Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, didampingi Karo Ops Kombes Pol. Nurhandono, Dirreskrim Kombes Pol. Frido Situmorang, dan Kabid Hukum Kombes Pol. Arif Hidayat Ritonga.

Dalam audiensi tersebut, Plt. Kakanwil menegaskan pentingnya sinergi antara Kemenkum dan Polda, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan kerja sama Polda Kalsel selama ini. Audiensi ini menjadi bentuk nyata sinergitas dan komitmen bersama dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan masing-masing,” ujar Nuryanti Widyastuti.

Salah satu poin yang dibahas adalah perubahan nomenklatur instansi. Nuryanti menjelaskan bahwa nomenklatur “Kementerian Hukum (Kemenkum)” kini secara resmi digunakan menggantikan sebutan sebelumnya sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi dan penguatan kelembagaan.

“Perubahan nama ini bukan sekadar administratif, tapi merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan mempertegas peran institusi dalam sistem pemerintahan,” tambahnya.

Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menyambut baik audiensi ini dan menyampaikan pentingnya koordinasi lintas lembaga.

“Kolaborasi antara Polda dan Kemenkum harus terus dijaga. Terutama dalam pengelolaan fasilitas bersama yang mendukung operasional masing-masing instansi,” ungkapnya.

Dalam forum ini juga dibahas kelanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan di lokasi perkantoran Banjarbaru. Dengan lokasi yang berdampingan, dibahas pula pemanfaatan akses jalan dan saluran air dari Gedung Kanwil Kemenkum yang bersinggungan langsung dengan area Mapolda.

Audiensi ini juga menjadi wahana konsolidasi guna memastikan arah kebijakan dan rencana tindak lanjut berjalan sinergis.

“Kami siap menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan ke depannya,” pungkas Nuryanti.

Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Hasil audiensi ini akan menjadi dasar untuk langkah-langkah koordinatif selanjutnya, baik dalam hal penyusunan kebijakan teknis maupun pelaksanaan kerja sama operasional di lapangan.



Semangat Muda ASN Baru! 16 CPNS Kemenkum Tahun 2024 Jalani Orientasi Disiplin dan Latihan Upacara di Kanwil Kalsel



Banjarmasin, Humas_Info — Sebanyak 16 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2024 yang diterima di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan orientasi yang digelar secara intensif sejak awal pekan ini. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk membentuk mental dan karakter ASN yang berintegritas dan disiplin tinggi.

Salah satu sesi yang paling menyita perhatian adalah pelatihan baris-berbaris (PBB) dan latihan upacara, yang dipandu langsung oleh Tim Panitia Pelaksana Kanwil Kemenkum Kalsel, Rabu (06/06). Bertempat di halaman kantor wilayah, para CPNS dengan semangat mengikuti setiap komando dan latihan dari instruktur yang bertugas.

"Pelatihan PBB dan latihan upacara merupakan bagian penting dalam membentuk karakter ASN yang disiplin, sigap, serta mampu bekerja sama dalam tim. Ini juga merupakan latihan dasar untuk menumbuhkan jiwa korps dan rasa kebanggaan terhadap institusi," ujar salah satu anggota panitia pelaksana kegiatan.

Meskipun cuaca cukup terik, para CPNS tetap menunjukkan antusiasme dan semangat yang tinggi dalam setiap sesi latihan. Mulai dari sikap sempurna, hormat, jalan di tempat hingga latihan tata upacara bendera, seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan penuh kesungguhan.

Kegiatan orientasi ini tidak hanya diisi dengan pelatihan fisik, tetapi juga pembekalan nilai-nilai ASN, wawasan kebangsaan, serta pengenalan struktur organisasi Kementerian Hukum di tingkat wilayah.

Dengan bekal kedisiplinan dan semangat pengabdian yang terus ditanamkan, diharapkan 16 CPNS baru ini mampu menjadi bagian dari generasi penerus ASN yang tangguh, loyal, dan siap menjaga marwah Kemenkum, khususnya di Kalimantan Selatan.



Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Bersama Pemkab Tapin, Bahas Tiga Ranperbup Terkait BLUD



Banjarmasin, Humas_Info — Rabu (4/6/25), Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) kembali menyelenggarakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil tersebut, harmonisasi dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Tapin yang mengajukan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) untuk dibahas dan disempurnakan substansinya.

Kegiatan resmi dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH), Anton Edward Wardhana. Dalam sambutannya, Anton menekankan pentingnya forum harmonisasi sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan peraturan daerah. Ia menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan ruang strategis untuk memastikan agar setiap rancangan peraturan yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Melalui rapat harmonisasi ini, kita dapat menyelaraskan substansi rancangan agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ini juga untuk menjamin kualitas regulasi yang kita hasilkan agar memiliki kepastian hukum dan efektivitas saat diimplementasikan," ujar Anton.

Rapat dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Eryck Yulianto. Ia memimpin jalannya diskusi secara menyeluruh dengan memberikan tanggapan terhadap substansi dan redaksional pada ketiga rancangan peraturan yang diajukan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin diwakili oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Zainal Abidin; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Taufiqurrahman; serta Kepala Dinas Kesehatan, Alfian Yusuf. Turut hadir pula perwakilan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Bagian Ekonomi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

H. Zainal Abidin dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas fasilitasi harmonisasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalsel. Ia mengatakan bahwa dukungan dari para perancang peraturan di Kanwil selama ini sangat membantu pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan daerah disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kami sangat berterima kasih atas pendampingan dari Kanwil Kemenkum Kalsel. Kehadiran para perancang yang profesional sangat memudahkan kami dalam menyiapkan regulasi yang sesuai dengan norma dan struktur hukum nasional," ungkap Zainal.

Adapun Ranperbup yang diharmonisasikan adalah tentang:

1. Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
3. Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Ia menambahkan bahwa ketiga Ranperbup yang diajukan pada rapat kali ini merupakan hasil dari kebutuhan riil di lapangan, khususnya dalam hal pengelolaan layanan kesehatan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Menurutnya, ketiga Ranperbup tersebut disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

"Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalismenya. Ketentuan ini harus diatur melalui Peraturan Kepala Daerah," terang Zainal.

Ia juga menjelaskan bahwa seluruh Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Tapin telah menerapkan pola pengelolaan keuangan berbasis BLUD, sehingga penyusunan ketiga Ranperbup ini menjadi sangat mendesak.

Sementara itu, Eryck Yulianto dalam jalannya rapat menjelaskan berbagai poin penting yang perlu disempurnakan dalam naskah rancangan. Ia memberikan masukan substantif maupun redaksional agar produk hukum yang dihasilkan tidak menimbulkan multitafsir dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Dari sisi substansi, kita harus pastikan bahwa norma yang dibentuk tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun konflik antar peraturan. Sementara dari aspek penulisan, konsistensi istilah dan struktur kalimat perlu dijaga," ujar Eryck di hadapan peserta rapat.

Diskusi berjalan aktif dengan berbagai masukan dari kedua belah pihak, baik dari Kanwil Kemenkum Kalsel maupun Pemerintah Kabupaten Tapin. Suasana rapat yang dinamis mencerminkan semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk menyusun peraturan daerah yang efektif, efisien, dan berpihak pada pelayanan publik. Seluruh proses harmonisasi berlangsung dengan tertib dan lancar. Hasil dari pembahasan ini selanjutnya akan dituangkan dalam perbaikan draf akhir ketiga Ranperbup sebelum diajukan ke tahapan berikutnya sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kanwil Kemenkum Kalsel Dampingi Bagian Hukum Pemkab Tapin Gunakan Aplikasi E-Harmonisasi

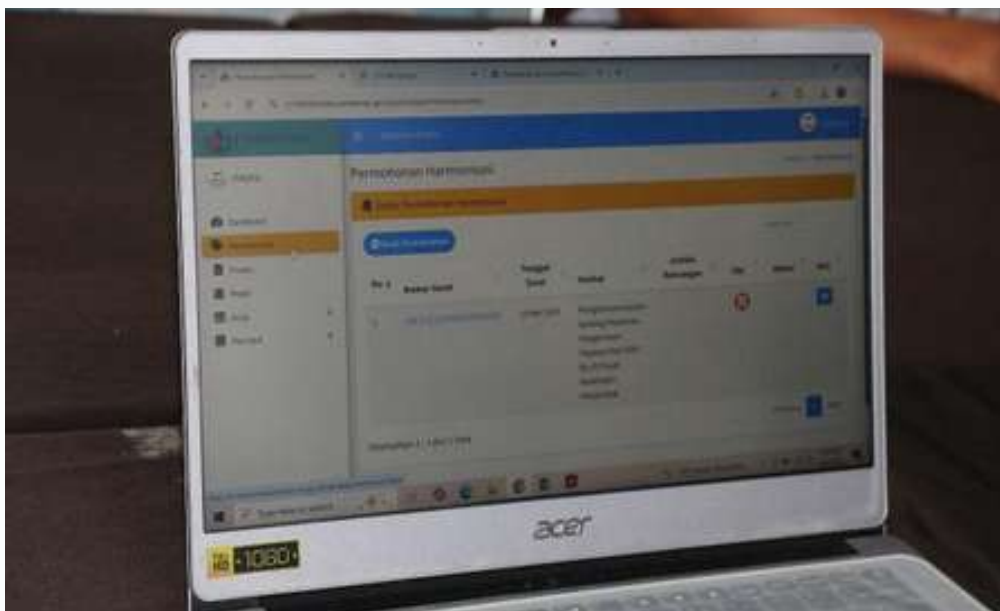


Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) melaksanakan kegiatan asistensi dan pendampingan penggunaan Aplikasi E-Harmonisasi kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tapin.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan penggunaan yang optimal terhadap Aplikasi E-Harmonisasi, sehingga proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi secara digital.

Dalam sesi asistensi ini, Operator E-Harmonisasi dari Kanwil Kemenkum Kalsel bersama Operator Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tapin membedah secara mendalam setiap tahapan dalam sistem aplikasi. Hal ini dilakukan agar pemahaman teknis terhadap fitur dan alur kerja aplikasi semakin meningkat.

Dengan pendampingan ini, diharapkan pemanfaatan E-Harmonisasi dapat menunjang proses harmonisasi yang lebih tertata, cepat, dan akuntabel, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan hukum yang berbasis digital dan responsif terhadap kebutuhan daerah.





Kemenkum Kalsel Ikuti Exposé Satu Dekade DJKI : Raih Penghargaan Video Terbaik Mars KI Berbasis Musik Tradisi



Jakarta, KI_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan Exposé Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi Kekayaan Intelektual yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2025, yang digelar di Jakarta pada Rabu, (04/06/2025).

Kegiatan ini mengusung tujuan utama untuk menampilkan capaian dan perkembangan ekosistem Kekayaan Intelektual (KI) nasional selama sepuluh tahun terakhir, serta memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam pembangunan KI di Indonesia. DJKI mencatat bahwa selama satu dekade terakhir, terdapat lebih dari 1,7 juta permohonan KI, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 18,5% per tahun, mencerminkan kemajuan signifikan dalam kesadaran dan pemanfaatan KI.

Dalam rangkaian kegiatan apresiasi tersebut, Kanwil Kemenkum Kalsel berhasil meraih penghargaan sebagai Video Terbaik dalam ajang Apresiasi Aransemen Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara. Karya video yang ditampilkan oleh Kanwil Kalsel menggabungkan aransemen khas alat musik tradisional Banjar Kalimantan Selatan dengan visual budaya lokal yang memukau, mencerminkan semangat pelestarian budaya dalam bingkai kekayaan intelektual.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas, kekayaan artistik, dan pesan edukatif yang kuat dalam karya tersebut.

Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini. “Kami bersyukur atas penghargaan yang diraih. Ini menjadi bukti bahwa sinergi antara budaya lokal dan semangat kekayaan intelektual bisa menghasilkan karya yang inspiratif. Kami berkomitmen untuk terus mendorong pelestarian budaya dan perlindungan kekayaan intelektual di Kalimantan Selatan, ini pencapaian yang luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, acara ini juga menjadi momentum peluncuran berbagai inisiatif strategis DJKI, seperti Kick Off Road Map Kekayaan Intelektual, peluncuran Laman Edukasi dan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) versi 2025, serta penyerahan sertifikat dan penghargaan kepada mitra DJKI dan Kantor Wilayah yang berprestasi.

Partisipasi aktif Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini mencerminkan semangat untuk terus memperkuat budaya sadar KI di daerah, serta berkontribusi dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.





Kemenkum Kalsel Gelar Rapat Harmonisasi Ranperda RPJMD Provinsi Kalsel 2025-2029



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggelar Rapat Harmonisasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Forum kali ini membahas harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Rapat harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang akan ditetapkan telah selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Rancangan RPJMD yang diajukan menjadi dokumen penting dalam mewujudkan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana. Dalam arahannya, Anton menegaskan bahwa harmonisasi adalah tahapan krusial dalam pembentukan peraturan daerah. Ia menyampaikan bahwa proses ini menjadi ruang strategis untuk menjamin sinkronisasi regulasi dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

"Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi serta menilai kesesuaian substansi ranperda terhadap norma hukum yang berlaku. Tujuannya tentu agar peraturan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum, serta efektif dalam pelaksanaannya," ujar Anton dalam sambutannya.

Rapat dipandu oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalsel, Bahjahtul Mardiah. Turut hadir para Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor beserta jajaran, serta Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, Said.

Dalam kesempatan tersebut, Ariadi Noor menyampaikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum Kalsel atas dukungan fasilitasi harmonisasi. Ia juga menjelaskan secara garis besar isi Ranperda yang diajukan, yang memuat arah pembangunan daerah sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih.

Ranperda RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai tindak lanjut dari kebutuhan akan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah. Dokumen ini menjadi pedoman utama pembangunan dalam lima tahun ke depan, sesuai dengan RPJPD dan RPJMN, dan dirancang untuk memastikan sinergi antar perangkat daerah, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Landasan hukum penyusunan ranperda ini mengacu pada ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah.

Selama proses harmonisasi, Bahjahtul Mardiah menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperbaiki dalam naskah rancangan. Ia memberikan berbagai catatan substansi maupun redaksional guna memastikan Ranperda tersebut memenuhi asas-asas pembentukan peraturan yang baik. "Kita harus pastikan bahwa norma yang dibentuk tidak tumpang tindih atau menimbulkan kekosongan hukum. Selain itu, penting untuk menjaga konsistensi istilah dan struktur penulisan agar dapat dimengerti dan diimplementasikan dengan tepat," terang Bahjahtul.

Diskusi dalam rapat berlangsung secara interaktif. Para peserta dari kedua belah pihak aktif menyampaikan pandangan, menunjukkan semangat sinergi untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik. Keseluruhan proses harmonisasi berlangsung tertib dan konstruktif. Hasil dari rapat ini akan menjadi dasar penyempurnaan konsep akhir Rancangan Peraturan Daerah sebelum melangkah ke tahap selanjutnya dalam proses legislasi sesuai ketentuan perundang-undangan.



Parletak Kanwil Kemenkum Kalsel Masuki Hari Kedua: Peserta Perdalam Materi Keilmuan Hukum, Struktur Sosial, Gender, dan Bantuan Hukum



Banjarmasin, Humas_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Selatan menggelar Pelatihan Paralegal Serentak II Khusus Kelompok Kadarkum telah memasuki hari kedua, pelatihan ini digelar secara daring melalui video teleconference Zoom Meeting, Rabu, (04/05/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) Kalimantan Selatan dan diikuti oleh 64 peserta dari enam daerah, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong.

Pada hari kedua pelatihan, peserta mendapatkan 4 (empat) materi utama, hadir sebagai narasumber berpengalaman dalam dunia bantuan hukum di Kalimantan Selatan yaitu LKBHuWK. Materi pertama, membahas tentang Struktur Sosial, yang dibawakan oleh Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., Kemudian dilanjutkan materi kedua, mengenai Pengantar Hukum dan Demokrasi disampaikan oleh Muhammad Fikri Aufa, S.H., M.H. Sementara itu, materi ketiga tentang Gender disampaikan oleh Hj. Yurliani, S.H.. Sedangkan materi keempat tentang Bantuan Hukum dan Advokasi disampaikan oleh Dr. Hj. Yulia Qamarianti, S.H., M.Hum.

Dipaparkan dalam materi pertama bahwa seorang paralegal diharuskan dapat memahami Struktur Sosial di masyarakat, seperti ciri-ciri dan karakter umum kelompok generasi. "Kita harus memahami bahwa di lingkungan masyarakat terdapat berbagai kelompok generasi yang memiliki ciri-ciri dan karakter yang berbeda dari masa-kemasa, ada generasi X, Generasi Y, Generasi Z, dan Generasi Alpa. Tentunya tiap generasi itu tidak sama. Pemahaman ini penting bagi paralegal agar dapat membaca dan memberikan penanganan yang sesuai pada saat memberikan layanan kepada masyarakat", papar Erlina.

Memperdalam khasanah keilmuan hukum peserta pelatihan, Muhammad Fikri Aufa menyampaikan bahwa di dalam dunia hukum, dikenal istilah hukum positif dan hukum progresif. Hukum Positif adalah hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang terikat pada teks hukum dan memprioritaskan hukum formal, sedangkan hukum progresif bertujuan mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan manusia dan terbuka pada penafsiran yang lebih luas serta memprioritaskan keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai Bantuan Hukum dan Advokasi, Yulia Qamarianti menjelaskan teknis layanan bantuan hukum. "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang atau kelompok orang miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum. Jasa ini bertujuan untuk memastikan akses keadilan bagi semua orang, terlepas dari kemampuan finansialnya. Bantuan hukum dapat berupa pendampingan, pembelaan, konsultasi, atau penyuluhan hukum," jelas Yulia.

Kegiatan pelatihan di hari kedua ini terlaksana dengan sangat baik, peserta turut aktif dalam kegiatan, hal ini dipaparkan oleh Dianor, S.H., M.H. selaku Koordinator Penyuluh Hukum pada Kanwil Kemenkum Kalsel.

"Alhamdulillah hari ini memasuki hari kedua pelatihan, tentunya berjalan dengan baik, para peserta aktif berinteraksi tanya jawab dengan narasumber berpengalaman di dunia bantuan hukum di Kalimantan Selatan", papar Dianor.

Dianor juga menjelaskan para peserta yang lulus mendapatkan gelar Non Akademik yaitu Certified Paralegal Legal Aid (CPLA).

"Kita pantau terus keaktifan dan kehadiran para peserta pelatihan, karena hal ini berpengaruh pada penilaian kelulusan peserta, dan peserta yang lulus nanti mendapatkan gelar non akademik Certified Paralegal Legal Aid (CPLA). Gelar ini dijamin oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum", Tambah Dianor.



Orientasi Hari Ketiga: Pembekalan Materi dan Pengenalan Lingkungan Kerja bagi CPNS



Banjarmasin, Humas_Info – Memasuki hari ketiga pelaksanaan Orientasi CPNS di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, para peserta mendapatkan pembekalan materi dari Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta berkesempatan mengenal lebih dekat lingkungan kerja di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Rabu (4/6).

Kegiatan dibuka dengan penyampaian materi oleh Kabag Tata Usaha dan Umum, Rustam Sakka, yang menjelaskan secara komprehensif mengenai tugas pokok dan fungsi bagian tata usaha.

Setelah itu, para CPNS dibekali pengetahuan seputar peran dan fungsi Tim Kerja Humas serta Reformasi Birokrasi (RB) dan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang menyampaikan materi sekaligus mendampingi tim dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam memberikan penjelasan teknis terkait proses penggajian CPNS. Para peserta diberi panduan mengenai mekanisme pembukaan rekening, pemrosesan gaji, hingga pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban keuangan sebagai ASN.

Sebagai bagian dari pengenalan lingkungan kerja, para CPNS diajak berkeliling ke seluruh area kantor. Dalam kegiatan tur ini, mereka diperkenalkan kepada masing-masing bagian dan ruangan kerja, serta diberikan kesempatan untuk berkenalan langsung dengan para pegawai.

Dengan suasana hangat dan interaktif, kegiatan hari ketiga ini diharapkan semakin memperkuat pemahaman para CPNS terhadap kultur kerja di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan integritas sejak dini.





Permudah Syarat, Menkum Targetkan Pendaftaran Indikasi Geografis Nomor 1 di ASEAN



Jakarta - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menargetkan agar Indonesia menduduki peringkat pertama se-ASEAN dalam hal jumlah indikasi geografis yang terdaftar di tahun 2025. Untuk mencapai target ini, Supratman mengatakan Kementerian Hukum (Kemenkum) akan memudahkan proses pendaftaran indikasi geografis.

“Saya harap jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menyederhanakan proses pendaftaran indikasi geografis agar semakin banyak yang mendaftar, jangan dipersulit,” ucap Supratman di gedung Kemenkum, Rabu (4/6/2025).

Selain itu, Kemenkum melalui DJKI menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk turut serta mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi unggulan para peneliti di Indonesia.

Tak hanya di tingkat nasional, Kemenkum juga mendorong kolaborasi antara Kantor Wilayah Kemenkum dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperluas jangkauan perlindungan KI hingga ke seluruh pelosok nusantara. “BRIN mendorong peran BRIDA di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian mendalam dan pendampingan terkait potensi indikasi geografis sebagai KI komunal bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari keunikan produk-produk khas daerah masing-masing,” terang menteri kelahiran Sulawesi ini dalam acara Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI.

Menurut Supratman, upaya meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual, termasuk indikasi geografis, harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan KI. Untuk itu, DJKI meluncurkan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, ekii.dgip.go.id. Inovasi ini merupakan pusat pembelajaran KI yang komprehensif serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan KI saat ini terus tumbuh. Hal ini perlu terus kita dukung dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Ketika karya anak bangsa terlindungi, kepercayaan diri meningkat, investasi dalam inovasi tumbuh, dan mendorong kemajuan Indonesia di kancah global,” katanya.

Untuk diketahui, DJKI Kemenkum mencatatkan peningkatan permohonan KI dalam satu dekade terakhir. Sepanjang 2015 s.d. 2024, pertumbuhan permohonan KI rata-rata sebesar 18,5% per tahun dan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 permohonan. Kemudian, permohonan KI pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 88.893. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin pada periode yang sama. Capaian ini diiringi dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp297.584.111.537 atau 31,83% dari target tahun ini.

“Peningkatan signifikan jumlah pendaftaran KI dan terwujudnya sistem perlindungan yang modern serta terintegrasi merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem KI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Supratman.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan dukungannya atas arahan Menteri Hukum RI untuk mempermudah pendaftaran Indikasi Geografis. “Kami siap menindaklanjuti arahan ini dengan mendorong potensi daerah di Kalimantan Selatan agar bisa segera didaftarkan sebagai indikasi geografis. Pendampingan dan sosialisasi akan terus kami tingkatkan,” ujarnya.

Ia juga menilai kerja sama dengan BRIDA sangat penting untuk menggali dan mengembangkan produk khas daerah. “Sinergi antara Kemenkum di daerah dengan BRIDA dan instansi terkait akan kami perkuat agar perlindungan kekayaan intelektual komunal benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucap Nuryanti.

Terkait peluncuran Laman Edukasi KI, Nuryanti menyambut positif langkah tersebut. “Akses informasi yang mudah dan menyeluruh akan mendorong kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap perlindungan karya dan inovasi,” tutupnya.



Ekspos Kinerja DJKI: Satu Dekade Pelindungan Kekayaan Intelektual



Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum meraih capaian yang cukup gemilang dalam satu dekade terakhir memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual (KI) nasional. Sepanjang 2015 s.d. 2024, pertumbuhan permohonan KI rata-rata sebesar 18,5% per tahun dan puncaknya pada tahun 2024 mencapai 339.304 dari seluruh rezim.

“Peningkatan signifikan jumlah pendaftaran KI dan terwujudnya sistem pelindungan yang modern serta terintegrasi merupakan bukti nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem KI yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya pada kegiatan Expose Kinerja Satu Dekade dan Apresiasi KI dalam rangka Hari KI Sedunia 2025 di Graha Pengayoman, Rabu, 4 Juni 2025.

Berdasarkan data dari DJKI, permohonan KI pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 88.893, jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun kemarin pada periode yang sama. Capaian ini diiringi dengan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp297.584.111.537 atau 31,83% dari target tahun ini.

“Implementasi visi strategis untuk memajukan karya kreatif dan inovatif anak bangsa di era digital telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terbukti dari peningkatan jumlah permohonan yang signifikan hingga caturwulan pertama ini,” jelas Supratman.

Peningkatan permohonan ini merupakan dampak positif dari kegiatan sosialisasi yang selama ini dijalankan oleh DJKI baik secara daring ataupun luring. Sepanjang Januari hingga April 2025, kegiatan ini diikuti oleh 4.009 peserta diseminasi dan 24.300 peserta edukasi KI dari berbagai penjuru nusantara.

Transformasi Digital Pelindungan KI

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pelindungan KI, DJKI meluncurkan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia, ekii.dgip.go.id. Inovasi ini merupakan pusat pembelajaran KI yang komprehensif serta mudah diakses dari mana saja dan kapan saja.

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan KI saat ini terus tumbuh. Hal ini perlu terus kita dukung dengan kemudahan-kemudahan teknologi. Ketika karya anak bangsa terlindungi, kepercayaan diri meningkat, investasi dalam inovasi tumbuh, dan mendorong kemajuan Indonesia di kancah global,” kata Supratman.

Menurut Supratman, DJKI saat ini dinilai berhasil melaksanakan transformasi digital yang digalakkan oleh Kementerian Hukum untuk mewujudkan layanan hukum yang semakin mudah bagi masyarakat. Tahun 2025, DJKI menggunakan teknologi e-seal pada surat pencatatan hak cipta sebagai proteksi tambahan untuk menjaga originalitas dokumen yang dikeluarkan oleh negara.



(Lanjutan) 5 Juni 2025

Ekspos Kinerja DJKI: Satu Dekade Pelindungan Kekayaan Intelektual

Dalam mewujudkan transformasi digital, Supratman menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antarlembaga demi memberikan pelindungan KI secara maksimal. Kementerian Hukum melalui DJKI bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Kekayaan Intelektual di Indonesia untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Presiden Republik Indonesia 2024-2029.

Selain itu, DJKI juga bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk turut serta mendorong peningkatan permohonan KI pada bidang paten, hak cipta, dan indikasi geografis yang bersumber dari hasil riset dan inovasi unggulan para peneliti di Indonesia. “Khususnya untuk indikasi geografis kami berharap target tahun ini Indonesia menjadi peringkat pertama se-ASEAN dalam jumlah indikasi geografis terdaftar,” tutur Supratman.

Tidak hanya itu, BRIN juga berkomitmen untuk mendukung optimalisasi peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai upaya memperluas jangkauan pelindungan KI hingga ke seluruh pelosok nusantara. “BRIN mendorong peran BRIDA di seluruh Indonesia untuk melakukan penelitian mendalam dan pendampingan terkait potensi indikasi geografis sebagai KI komunal bernilai ekonomi tinggi yang berasal dari keunikan produk-produk khas daerah masing-masing,” terang Supratman.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelindungan KI di tingkat daerah, DJKI juga meningkatkan kolaborasi yang komprehensif dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pelindungan KI melalui program sosialisasi yang masif dan pendampingan intensif bagi pemilik karya di daerah. DJKI juga melaksanakan pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) sebagai salah satu program unggulan dengan melakukan identifikasi wilayah-wilayah yang telah memaksimalkan potensi lokal dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif melalui pelindungan dan pemanfaatan KI. “Sebagai wujud apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran, melalui acara ini kami memberikan penghargaan kinerja kepada tujuh kantor wilayah terbaik dalam memajukan KI,” ungkap Supratman.

Pelestarian Budaya melalui KI

Pelindungan KI tidak hanya fokus pada aspek modern, DJKI juga menaruh perhatian pada KI Komunal (KIK) seperti ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal sebagai warisan budaya tak benda yang menjadi identitas komunitas. Dalam rangka Hari KI Sedunia Tahun 2025, DJKI melaksanakan lomba aransemen Mars KI yang diciptakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dengan menggunakan musik tradisi nusantara.

Ini merupakan salah satu wujud komitmen DJKI dalam memberikan wadah pelestarian budaya melalui pendekatan KI. Lomba ini berhasil meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai institusi dengan mars unsur varian etnik terbanyak (Mars KI Indonesia - 33 Nuansa Daerah). Supratman mengimbau untuk memutar mars dengan alunan tradisi nusantara pada setiap kegiatan terkait KI.

Menutup sambutannya, Supratman memberikan apresiasi kepada seluruh pihak pemangku kepentingan di bidang KI dan para penerima penghargaan. Pihaknya berpesan untuk terus meningkatkan kreativitas dan memberikan inspirasi kepada masyarakat. “Selamat kepada seluruh penerima penghargaan, teruslah berkarya dan menginspirasi. Mari kita terus bergerak maju, menjadikan KI sebagai pilar utama kemajuan bangsa,” pungkaskan Supratman.

Secara terpisah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan apresiasi atas capaian satu dekade pelindungan kekayaan intelektual oleh DJKI. “Capaian ini menunjukkan kerja keras dan konsistensi seluruh jajaran, termasuk di daerah, dalam memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual. Kami di Kalimantan Selatan akan terus mendukung upaya ini melalui sosialisasi dan pendampingan yang lebih masif kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyambut baik berbagai inovasi digital yang telah diluncurkan DJKI, termasuk laman edukasi KI dan penggunaan teknologi e-seal. “Kemudahan akses informasi dan layanan yang cepat sangat penting untuk mendorong masyarakat mendaftarkan karya dan inovasinya. Ini adalah langkah nyata menuju pelayanan hukum yang adaptif dan responsif,” katanya.

Nuryanti menambahkan bahwa kolaborasi antara DJKI dengan BRIN dan BRIDA juga akan diperkuat di wilayah. “Potensi lokal di Kalimantan Selatan sangat besar, dan dengan sinergi yang tepat, kita bisa mendorong lebih banyak pendaftaran indikasi geografis dan kekayaan intelektual lainnya sebagai penopang ekonomi daerah,” jelasnya.

Terkait dengan upaya pelestarian budaya melalui KI Komunal, Nuryanti menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya lokal. “Kami mendorong agar ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan lokal di Kalimantan Selatan bisa dicatatkan sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal, sehingga bisa terus dilestarikan dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkaskannya.



Kadiv PPPH Kemenkum Kalsel Berikan Arahan kepada Peserta Pelatihan Paralegal Serentak Tahap II



Banjarmasin, Humas_Info — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel), Nuryanti Widyastuti melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv PPPH), Anton Edward Wardhana memberikan arahan penting kepada peserta Pelatihan Paralegal Serentak Tahap II (Parletak II) yang digelar serentak di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Kepala Divisi PPPH menyampaikan bahwa Menteri Hukum memberikan perhatian dan apresiasi yang tinggi terhadap keikutsertaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) dalam pelatihan ini. Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menargetkan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

"Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para peserta agar dapat berperan sebagai paralegal di desa atau kelurahan, menjadi garda terdepan dalam membantu kepala desa atau lurah menyelesaikan persoalan hukum masyarakat sebelum berlanjut ke ranah peradilan," ucap Anton.

Adapun cakupan peran paralegal meliputi:

Pelayanan informasi hukum, Pelayanan mediasi dan negosiasi, Pelayanan pendampingan litigasi dan non-litigasi, Rujukan advokasi.

Kadiv PPPH menegaskan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum, berharap pelatihan ini dapat menjadi wadah edukasi bagi masyarakat terkait permasalahan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum di tingkat akar rumput.

Menutup arahannya, Anton menyampaikan bahwa untuk pelatihan pada periode berikutnya, informasi dapat disampaikan kepada anggota Kadarkum yang telah diangkat secara resmi melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah, agar dapat mengikuti pelatihan Parletak lanjutan.

Melalui pelatihan ini, diharapkan kehadiran paralegal di desa dan kelurahan dapat memperluas akses keadilan bagi masyarakat dan memperkuat budaya hukum di tingkat lokal.

Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta akan memasuki tahapan aktualisasi selama tiga bulan ke depan. Pada tahap ini, peserta diharapkan mengimplementasikan hasil pelatihan secara nyata di desa atau kelurahan masing-masing, baik melalui kegiatan pelayanan informasi hukum, mediasi, pendampingan hukum, maupun advokasi masyarakat. Aktualisasi ini menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas pelatihan sekaligus memperkuat peran paralegal sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan hukum di tingkat lokal.



Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ormas Tahun 2025: Dorong Kesadaran Hukum dan Peran Strategis Ormas



Banjarmasin, Humas_Info — Dalam upaya memperkuat peran serta organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam pembangunan daerah, Satuan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025, Kamis, (05/06). Bertempat di Pyramid Suite Hotel Banjarmasin, kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan Ormas di Kalimantan Selatan dan dibuka secara resmi oleh Kepala Satuan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Heriansyah.

Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan Ormas sebagai pondasi untuk mendorong kemajuan organisasi yang lebih terstruktur dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Pemaparan pertama disampaikan oleh Ibu Dewi Woro Lestari, dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam materinya, beliau menjelaskan kebijakan pemerintah terkait legal standing administrasi hukum bagi Ormas, termasuk tata cara pendaftaran dan pemenuhan persyaratan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan ketertiban hukum yang selaras dengan nilai-nilai demokrasi, sehingga setiap Ormas dapat beroperasi secara sah dan transparan di tengah masyarakat.

Sesi selanjutnya menghadirkan narasumber akademisi, Dr. Siswanto Rawali, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dalam paparannya, Ia mengulas peran strategis Ormas dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial. Ia menyoroti bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas organisasi melalui program pembinaan yang berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan seputar legalitas Ormas, mekanisme penganggaran, hingga peran aktif Ormas dalam mendukung program-program pemerintahan dan penanganan isu premanisme. Diskusi hangat ini mencerminkan tingginya kepedulian Ormas terhadap keberlangsungan organisasinya di tengah tantangan zaman. Acara ditutup dengan sesi foto bersama, yang menjadi simbol sinergi dan komitmen antara pemerintah dan Ormas dalam membangun Kalimantan Selatan yang tertib, aman, dan demokratis.



Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Launching Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum



Banjarmasin, Humas_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti menghadiri kegiatan Launching Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan Portal Informasi Bantuan Hukum yang dirangkaikan dengan pembukaan Pelatihan Paralegal Serentak Tahun 2025 serta Pelatihan Juru Damai bagi Kepala Desa dan Lurah (Peacemaker Training). Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (5/6) di Graha Pengayoman dan juga diikuti oleh Kepala Divisi Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardana secara virtual.

Dalam laporannya, Min Usihen menegaskan bahwa peluncuran ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat melalui Posbakum yang hadir lebih dekat di desa/kelurahan. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan ini mendukung transformasi digital dan integrasi layanan hukum, sekaligus membangun kapasitas paralegal dan juru damai yang efektif.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPHN dan Stakeholder terkait yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya yang mewakili Menteri Dalam Negeri. Ia menyampaikan bahwa desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan kemandirian desa, termasuk melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia juga memberikan apresiasi atas inisiatif Kementerian Hukum membentuk Posbankum di desa dan kelurahan sebagai upaya nyata memperluas akses keadilan.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Veronica Tan, dalam sambutannya turut mengapresiasi pendirian Posbakum yang dapat membantu pemberdayaan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat peran negara dalam perlindungan kelompok rentan.

Sementara itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, menyebut bahwa kehadiran Posbakum merupakan langkah besar negara dalam memastikan seluruh warga desa mendapatkan layanan hukum yang setara, sebagai bentuk nyata kehadiran negara hingga ke pelosok desa.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Posbakum Desa/Kelurahan adalah bagian dari upaya mewujudkan akses keadilan yang merata bagi masyarakat miskin. Beliau menekankan pentingnya pendekatan People Centered Justice dalam layanan hukum, yang mencakup layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi sengketa, hingga rujukan kepada advokat.

Puncak kegiatan ditandai dengan peluncuran simbolis Pos Bantuan Hukum dan penyampaian keynote speech oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Sunarto. Dalam paparannya, Ketua MA menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat akar rumput, sekaligus memperkuat fungsi perdamaian dan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Ia juga menilai bahwa pelatihan juru damai bagi kepala desa dan lurah akan berdampak langsung dan positif bagi masyarakat, mengingat peran sentral para pemimpin desa/lurah sebagai figur terdekat warga.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan program ini. Ia juga menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel siap bersinergi dalam mengawal pelaksanaan Posbankum di wilayah Kalimantan Selatan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, aparat desa dan kelurahan, serta organisasi bantuan hukum untuk memastikan layanan ini berjalan efektif dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan akses hukum berbasis masyarakat, memperkuat sinergi antarinstansi, dan memperluas cakupan layanan bantuan hukum yang inklusif dan berkeadilan.



Ditetapkan Menteri Hukum, Kelurahan Sungai Jingah Banjarmasin Raih Predikat Nasional sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025



Banjarmasin, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas penghargaan yang diterima dalam Penetapan Kampung Sasirangan Sungai Jingah sebagai Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Tahun 2025 untuk kategori Kawasan Karya Cipta. Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Rabu (04/06) sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan kontribusi masyarakat serta pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual lokal.

Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama yang erat antara Kanwil Kemenkum Kalsel, Pemerintah Kota Banjarmasin, serta para pelaku UMKM dan komunitas kreatif di Kampung Sasirangan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nuryanti Widyastuti, mengungkapkan apresiasinya atas capaian ini.

“Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dapat mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual secara optimal. Kampung Sasirangan tidak hanya menjadi simbol budaya lokal, tetapi juga contoh bagaimana karya cipta dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif,” ujar Nuryanti.

Lebih lanjut, Nuryanti menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus berkomitmen untuk mendorong terbentuknya kawasan-kawasan berbasis kekayaan intelektual lainnya di wilayah Kalimantan Selatan, baik di bidang karya cipta, merek, maupun indikasi geografis.

“Kami berharap capaian ini menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk lebih peduli terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya dalam menggali potensi lokal yang memiliki nilai jual dan nilai budaya yang tinggi,” tambahnya.

Pengakuan terhadap Kampung Sasirangan sebagai kawasan berbasis KI ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendaftarkan dan melindungi hasil karya intelektual, sekaligus memperkuat posisi produk lokal di pasar nasional maupun internasional.





**KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**



Terhubung lebih dekat:



[kemenkumkalsel](https://www.kemenkumkalsel.go.id)



[@kemenkumkalsel](https://twitter.com/kemenkumkalsel)



kalsel.kemenkum.go.id